



Media: Kedaulatan Rakyat

Hari: Kamis

Tanggal: 09 Juli 2026

Halaman: 2

KOMISI B DPRD KOTA YOGYAKARTA Dorong Optimalisasi RKPD 2026, Soroti Sektor Pajak Hingga Investasi



YOGYA (KR) - Komisi B DPRD Kota Yogyakarta memberikan atensi penuh terhadap pembahasan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) terkait perubahan anggaran 2026 bersama jajaran mitra kerja eksekutif. Langkah ini diambil untuk memastikan program kerja yang disusun benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat. Beberapa aspek krusial yang menjadi sorotan utama dewan meliputi peningkatan pendapatan daerah, penguatan kampung wisata, optimalisasi aset, akselerasi perizinan, hingga penguatan investasi.

Ketua Komisi B DPRD Kota Yogyakarta, Mohammad Sofyan, menilai bahwa perkembangan ekonomi terkini harus menjadi pertimbangan utama dalam menyusun strategi anggaran. Menurutnya, pemerintah daerah harus bergerak proaktif demi mengantisipasi ketidakpastian kondisi ekonomi global maupun nasional yang dinamis. Oleh karena itu, penyesuaian target dan inovasi program kerja menjadi hal yang tidak boleh ditawar lagi oleh pihak eksekutif.

Salah satu inovasi yang didorong kuat oleh dewan adalah pemutakhiran data pajak melalui pengembangan sistem AI Tax. Sistem canggih ini dirancang khusus untuk mendukung pendataan serta pengawasan objek pajak di wilayah Kota Yogyakarta. Melalui pemanfaatan teknologi digital seperti scraping data dan pemindaian berbagai sumber informasi digital, sistem ini nantinya akan mencocokkan data yang ditemukan dengan basis



Rapat kerja Komisi B bersama eksekutif.

data yang dimiliki pemerintah daerah.

"Pemanfaatan teknologi seperti AI Tax ini dapat menjadi sarana pengembangan yang mendukung penyediaan data dan informasi yang lebih mutakhir bagi pemerintah daerah," ujar Mohammad Sofyan.

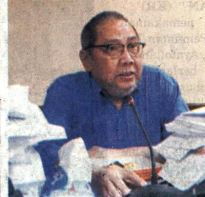
Beralih ke industri wisata, Sofyan menegaskan bahwa Dinas Pariwisata memiliki peran yang sangat strategis dalam menggerakkan roda perekonomian Kota Yogyakarta. Ia menekankan bahwa pariwisata tetap menjadi motor penggerak utama daerah, sehingga intervensi program kerja harus dilakukan secara tepat sasaran. Menurutnya, peningkatan kualitas destinasi wisata saat ini harus berjalan seiring dengan penguatan kapasitas masyarakat sebagai pelaku utama wisata.

Lebih lanjut, Sofyan juga memberikan catatan khusus mengenai arah



Ketua Komisi B Mohammad Sofyan.

kebijakan pengembangan kampung wisata di Kota Yogyakarta agar tidak sekadar menyentuh aspek visual semata. "Pengembangan kampung wisata tidak cukup hanya melalui pembangunan fisik, tetapi juga memerlukan pendampingan berkelanjutan agar masyarakat mampu mengelola potensi wisata secara profesional dan berkelanjutan," tegasnya.



Wakil Ketua Komisi B Danang Rudyatmoko.

Di sisi lain, Sekretaris Komisi B DPRD Kota Yogyakarta, Munazar, menyoroti sejumlah aset milik daerah yang dinilai belum dimanfaatkan secara optimal oleh pemerintah kota. Salah satu titik yang menjadi perhatian seriusnya adalah aset Pasar Sepeda yang berada di kawasan Sidokabul. Ia menilai aset-aset potensial seperti ini harus segera dihidupkan

agar memberikan dampak ekonomi nyata, sekaligus menekankan pentingnya penguatan sumber daya manusia untuk mendukung pengelolaan aset dan pelayanan publik yang lebih efektif.

Selain masalah aset, Munazar juga meminta agar hasil kajian potensi parkir tepi jalan umum dari Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

(BPKAD) segera diserahkan kepada Dinas Perhubungan (Dishub). Data hasil kajian tersebut dinilai mendesak untuk digunakan sebagai dasar evaluasi kekuatan dan kapasitas ruas jalan yang ada. Langkah ini diharapkan mampu mengurangi permasalahan penataan ruang jalan di Kota Yogyakarta secara lebih saintifik.

Munazar juga mendo-

rong pemerintah daerah untuk melakukan penataan tegas terhadap praktik parkir yang selama ini belum terkelola dengan baik oleh dinas terkait. "Kami mendorong penataan praktik parkir yang belum terkelola agar dapat dikonversi menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sah dan masuk ke kas daerah," kata Munazar.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi B DPRD Kota Yogyakarta, Danang Rudyatmoko, menyampaikan catatan kritis mengenai iklim investasi pascapandemi di Kota Yogyakarta yang dinilai belum kembali bergairah seperti tahun-tahun sebelumnya. Guna menyelesaikan stagnasi tersebut, ia meminta Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) segera menghadirkan inovasi program pada semester kedua tahun ini, sekaligus memastikan kesiapan anggaran dan volume kegiatan untuk mendukung pembangunan perhotelan yang terintegrasi dengan kawasan Sumbu Filosofi Yogyakarta.

Dirinya juga memetakan perkembangan target pendapatan perangkat daerah di sektor kesehatan. Terutama perkembangan target pendapatan sejumlah unit layanan kesehatan, meliputi UPT Laboratorium Kesehatan (Labkes), RSUD Kota Yogyakarta, RS Pratama, dan BLUD Puskesmas. Ini bertujuan memotret realisasi serta capaian pendapatan sebagai dasar pengembangan layanan kesehatan bagi masyarakat.

Pendalaman terhadap proyeksi pendapatan sektor kesehatan diharapkan menjadi dasar penyusunan kebijakan anggaran yang lebih tepat, sehingga keberlanjutan layanan kesehatan di rumah sakit maupun puskesmas tetap terjaga dan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat Kota Yogyakarta secara optimal. (Dhl)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Sekretariat DPRD Kota	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 29 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005